



RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

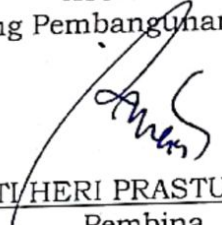

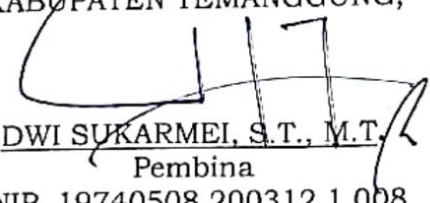
TAHUN 2023

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
RINAWATI/HERI PRASTUTI, S.E., M.M
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T.
Penata
NIP.197909242003122006Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,
DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenanNya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perangkat daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2023. Adapun tujuan dari disusunnya Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;

Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas - tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,


TRI WINARNO, SE.MM

Pembina Tk. I

NIP. 197310201999031005

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021.....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.....	21
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	73
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	74
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	82
2.6. Inovasi Perangkat Daerah	82
2.7. Penghargaan	84
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	85
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	85
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD.....	85
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	89
4.1. Program dan Kegiatan.....	89
BAB V PENUTUP.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2021.....	12
Tabel. 2.2	Capaian Kinerja Per sasaran BPKPAD.....	20
Tabel. 2.3	Capaian Kinerja Perubahan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.....	22
Tabel 2.4.	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021	27
Tabel 2.5	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021	27
Tabel 2.6	Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	31
Tabel 2.7	Indeks dimensi pengakolasian Anggaran Belanja dalam APBD.....	33
Tabel 2.8	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	35
Tabel 2.9	Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Tahun 2021.....	36
Tabel 2.9	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu 2017-2021.....	37
Tabel 2.10	Data Penerimaan SPM & Penerbitan SP2D Tahun 2021	38
Tabel 2.11	Rekapitulasi Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu Per Bulan Pada Tahun 2021.....	41
Tabel 2.12	Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	42
Tabel 2.13	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel Tahun 2017-2021.....	49
Tabel 2.14	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021.....	50
Tabel 2.15	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021 s.d	52
Tabel 2.16	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2017-2021.....	53

Tabel 2.17	Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel Tahun Anggaran 2021	53
Tabel 2.18	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Tahun 2017-2021	59
Tabel 2.19	Data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2021	59
Tabel 2.19	Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat tahun 2017-2021.....	60
Tabel 2.20	Persertifikatan Tanah Pemda Tahun 2021	61
Tabel 2.21	Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak Tahun 2017-2021	61
Tabel 2.22	Data Objek pajak 6 Tahun Tahun 2017-2021	62
Tabel 2.23	Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	63
Tabel 2.24	Jumlah permohonan Perubahan Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	63
Tabel 2.25	Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2017-2021.....	66
Tabel 2.26	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2021	66
Tabel 2.27	Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021.....	67
Tabel 2.28	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021.....	68
Tabel 2.29	Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2017-2021.....	69
Tabel 2.30	Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2017 s.d 2021	69
Tabel 2.31	Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Tahun 2021.....	73
Tabel 2.32	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023.....	77
Tabel 2.33	Usulan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	84
Tabel 2.34	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2029-2021.....	84
Tabel 2.35	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021.....	86
Tabel 3. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan	

	Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	88
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2023.....	92
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2023.. ..	94
Tabel 5.1	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2023.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2
Gambar 2.2.1	Cek <i>list</i> Kelengkapan dokumen SPM LS.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

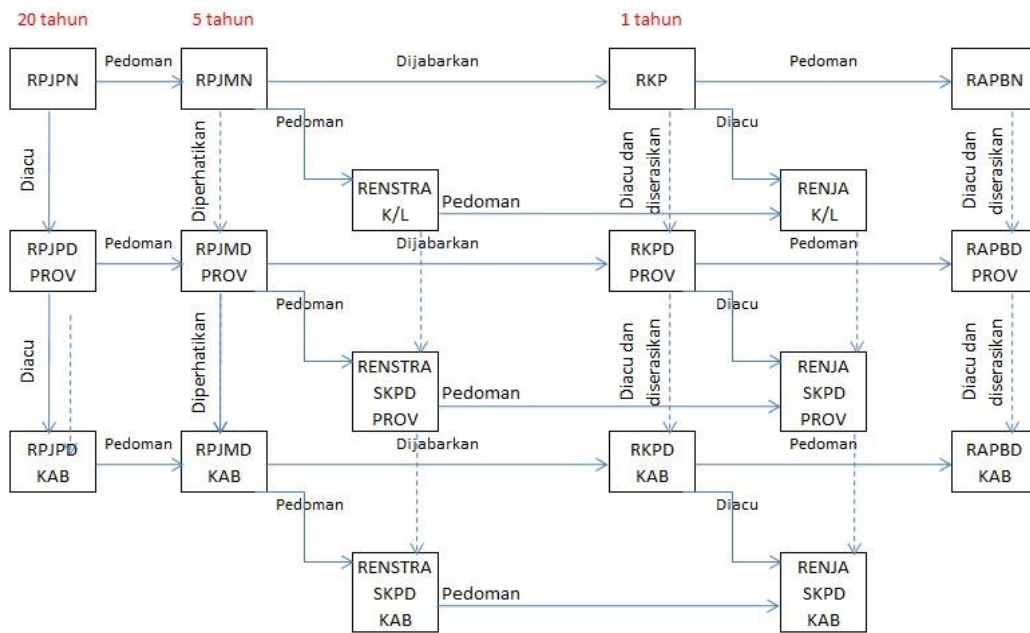
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, pada dasarnya

sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Analisis Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator

dalam Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;

- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

c. *Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Lalu Berdasarkan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;*

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan Tujuan Dan Sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

g. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan Kegiatan Prioritas Dan Strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Dengan Hasil

Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun
2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 terhadap capaian renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKPAD / TAHUN 2021

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23
5,02,02	Program pengelolaan keuangan daerah				19.097.797.924		5.721.653.172	96,84	6.323.000.000	2.327.399.750	59,88	1.945.581.736	83,59	
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100		96,49		100			100	-	100	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	90		96,46		89,96			100	-	100	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100		85,71		100			0,43	-	42,86	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100		100		100			100	-	100	
		Persentase realisasi keuangan	%	89,96		90,05		93			34,97	-	37,61	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90		84,67		90			84,78	-	94,20	
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP		WTP		WTP						
5,02,02, 201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				5.174.250.000		1.594.557.597		2.565.000.000	709.455.700		579.011.500	84,38	81,61
5,02,02, 2,01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	Dokumen	48	846.150.000	48	236.485.750	4	150.000.000	76.576.800	3,00	61.336.737	75,00	80,10
5,02,02, 2,01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	Dokumen	48		48		4	40.000.000	58.511.800	4,00	52.002.000	100	88,87
5,02,02, 2,01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	Dokumen	40900		11050		4324	40.000.000	30.000.000	4.424	6.897.200	100	22,99
5,02,02, 2,01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	Dokumen	40900	564.100.000	11050	78.415.800	4324	100.000.000	19.065.600	4.424	818.500	100	4,29
5,02,02, 2,01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	Dokumen	30		24		3	195.000.000	238.563.800	3,00	225.924.513	100	94,70
5,02,02, 2,01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan	Dokumen	30	3.764.000.000	24	1.279.656.047	3	820.000.000	226.737.700	3,00	212.832.550	100	93,87

	Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022												
5,02,02,2,01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	Paket	4	-	0	-	1	1.200.000.000	30.000.000	1,00	19.200.000	100	64,00
5,02,02,2,01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	Paket	4	-	0	-	1	20.000.000	30.000.000	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40406												84,38		
Predikat												sangat tinggi		
5,02,02,202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.128.267.924		210.762.838		320.000.000	478.055.600	7.204	384.185.776	96,50	80,36
5,02,02,202.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	orang/ASN	37400	1.128.200.000	67.924	210.762.838	7500	200.000.000	417.583.000	7.000	339.482.676	93,33	81,30
5,02,02,202.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Unit Kerja					104	100.000.000	49.756.600	102	38.697.900	98,08	77,77
5,02,02,202.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Unit Kerja					104	20.000.000	10.716.000	102	6.005.200	98,08	56,04
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40406												96,50		
Predikat												sangat tinggi		
5,02,02,203	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				12.795.280.000		3.916.332.737		3.438.000.000	1.139.888.450		982.384.460	98,81	86,18
5,02,02,203.02	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	Unit kerja	840	12.264.000.000	256	3.835.207.700	168	2.078.000.000	40.250.000	168	20.348.500	100	50,56

RENJA 2023 | BPKPAD

5,02,02, 203.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	531.280.000	2	81.125.037	1	160.000.000	60.276.150	1	49.245.600	100	81,70
5,02,02, 203.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	Dokumen	5		2		4	145.000.000	142.300.300	4	138.169.900	100	97,10
5,02,02, 203.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	Unit kerja	525		132		105	1.055.000.000	897.062.000	100	774.620.460	95,24	86,35
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40406												98,81		
Predikat												sangat tinggi		
502.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.816.875.000		271.255.795		660.000.000	3.037.709.050	86,69	1.845.914.766	60,77	60,77
		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1		66		84,52			93,91	-	93,91	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1		99		98,7			79,47	-	79,47	
502.03. 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			93,6	2.816.875.000		271.255.795	90,6	660.000.000	3.037.709.050		1.845.914.766	74,45	60,77
502.03. 201.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	Dokumen	125	1.128.200.000			25	200.000.000	20.669.000	10	17.924.501	40,00	86,72
502.03. 201.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu , terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan tertibnya pengel;olaan bmd	unit kerja	840	265.412.500	217	46.952.000	168	50.000.000	833.401.150	168	819.145.301	100	98,29
502.03. 201.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Bidang	720	530.912.500	85	106.126.573	45	95.000.000	1.828.367.500	90	711.121.875	100	38,89
502.03. 201.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	tanah/ban gunan	17205	892.350.000	3000	118.177.222	3441	175.000.000	193.169.000	1.110	148.971.418	32,26	77,12
502.03. 201.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang da terlaksananya laporan BMD	unit kerja	840		168		168	140.000.000	162.102.400	168	148.751.671	100	91,76
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40405												74,45		
Predikat												sangat tinggi		

502.04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.811.034.972		1.233.522.787		969.143.000	935.418.300	80,14	695.306.208	74,33	74,33
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27		1,05		0,72			0,70	-	97,22	
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	100		100		100			100	-	100	
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100		100		100			100	-	100	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95		100		90			100	-	100	
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95		100		95			100	-	100	
502.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.811.034.972		1.233.522.787		969.143.000	935.418.300		695.306.208	94,46	
502.04..201.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	OP	600	2.445.034.972	17.184	642.029.000	6000	513.143.000	497.051.300	4.337	311.241.886	72,28	62,62
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah	bulan	60	880.000.000	24	463.049.418	12	350.000.000	367.373.200	12	318.299.449	100	87
		Terlaksananya penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	SKPD	1200	880.000.000	3.200	463.049.418	1600	200.000.000		2.346		100	
502.04.201.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Bulan	60	186.000.000	24	41.288.400	12	41.000.000	15.023.500	12	12.337.700	100	82,12
502.04.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	Bulan	60	300.000.000	24	87.155.969	12	65.000.000	55.970.300	12	53.427.173	100	95,46
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40403													94,46	
Predikat													sangat tinggi	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.528.270.000		2.425.274.560		2.009.607.985	907.577.245		827.906.329	91,22	91,22
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			93,6	1.309.740.000		378.369.033	90,62	245.000.000	106.453.375	12	98.334.071	100	92,37
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	Bulan	60	99.615.000	24	28.035.900	12	15.000.000	9.999.875	12	100	100	99,21
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	Bulan	60	179.230.000	24	39.682.500	12	30.000.000	25.897.700	12	100	100	82,09
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Bulan	60	86.410.000	24	74.916.750	12	20.000.000	9.763.400	12	100	100	99,99
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Bulan	60	474.485.000	24	108.116.950	12	80.000.000	36.916.900	12	100	100	98,05
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	470.000.000	24	127.616.933	12	100.000.000	23.875.500	12	100	100	88,76
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program													100,00	

RENJA 2023 | BPKPAD

												Predikat	sangat tinggi	
5.02.01.2,08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93,6	3.789.405.000		1.469.199.837	90,62	1.369.607.985	601.637.985		562.938.979	100	93,57
5.02.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	33.205.000	24	7.040.000	12	5.000.000	1.495.000	12	100	100	80,27
5.02.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	Bulan	60	1.180.000.000	24	372.895.457	12	220.000.000	210.000.000	12	100	100	88,13
5.02.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	Bulan	60				12	404.607.985	390.142.985	12	100	100	96,55
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40701													100,00	
												Predikat	sangat tinggi	
5.02.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93,6	1.429.125.000		577.705.690	90,62	395.000.000	199.485.885		166.633.279	100,00	83,53
5.02.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas OPsl/ Lap	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Bulan	60	604.000.000	24	263.343.940	12	150.000.000	85.835.380	12	83.521.579	100	97,30
5.02.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	256.025.000	24	144.729.000	12	140.000.000	24.833.720	12	23.263.000	100	93,68
5.02.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	Bulan	60	287.050.000	24	103.485.750	12	55.000.000	18.793.220	12	15.785.000	100	83,99
5.02.01.2,09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	Bulan	60	282.050.000	24	66.147.000	12	50.000.000	70.023.565	12	44.063.700	100	62,93
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40702													100	
												Predikat	sangat tinggi	
jumlah									9.961.750.985	7.208.104.345		5.314.709.039		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH												94,89	73,73	
PREDIKAT												sangat tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH												77,48		
PREDIKAT												Akan Tercapai		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan, sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APB
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 100
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data
 - Penagihan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan, sebagai berikut
- Penyusunan Standar Harga, karena perpindahan tanggungjawab penyusunan standar harga dari Bagian Ortala Setda ke bidang BMD BPKPAD sehingga tidak tercatat dengan baik sehingga tercatat pencapaian kinerja hanya 40 %. Namun sebenarnya penyusunan buku Standarisasi harga tahun 2022 telah 100 % terlaksana.

- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan kenaikan harga sewa yang cukup tinggi, sehingga masyarakat merasa keberatan. Kenaikan harga berdasar appraisal/ hitungan dari pihak ketiga.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Rata-rata sebesar 100 % atau tergolong MEMUASKAN dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Per sasaran BPKPAD

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	1	2
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		1	2

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Perubahan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2021 (%)	STATUS	CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21
BIDANG KEUANGAN																		
FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN																		
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	na	na	14	15	15	15	15,12	16,79	18,67			100	TT	100	TT
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	NA	NA	NA	79,30	79,40	79,50	68,16	69,53	NA			NA	AT	NA	AT
1	Program pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%				100	100	100	97,83	96,49	99,77			99,77	AT	99,77	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%				89,96	89,96	89,96	100	100	100			100	TT	100	TT
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%				100	100	100	0,57	0,86	100			100	TT	100	TT

		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100			100	TT	100	TT
		Persentase realisasi keuangan	%	-	92,71	93	93	93	93	94,57	93,68	89,00			95,70	AT	95,70	AT
		Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%				90	90	90	95,74	85,11	89,13			99,03	AT	99,03	AT
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA			WTP	AK		AK
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	79,76	80,95	82,74	84,52	86,31	88,1	80,95	81,55	84,52			100,00	TT	95,94	TT
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	95,45	98,33	98,49	98,7	98,9	99,1	98,55	78,75	78,83			79,87	AT	79,55	AT
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	3,56	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27	1,14	1,053	0,70			97,22	AT	55,12	UK
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT	100

	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT	100	TT
	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	99,87	90	90	90	90	95	98,91	100	103,54				100	TT	100	TT
	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	93,54	90	95	95	95	95	100	100	100				100	TT	100	TT
JUMLAH INDIKATOR SASARAN		2	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG KEUANGAN											100,00	2	100,00	2	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		14	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN											97,82	14	94,24	13	
JUMLAH IKPD		16	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH											98,91	16	97,12	15	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 14 indikator program, dikategorikan SANGAT BAIK (97,82 %) dengan 8 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator akan tercapai yaitu :

1. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dari target 100 % tercapai 99,77 % dikarenakan :
 - Faktor pendorong : Penggunaan Aplikasi yang sudah menggunakan SIPD.
 - Faktor Penghambat : Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pengurangan pagu anggaran dan kegiatan.
2. Persentase realisasi keuangan tercapai 89 dari target 93 % karena :
 - Faktor pendorong : target kinerja
 - Faktor Penghambat : Persentasenya menurun karena pandemi covid maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH)
3. Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel tercapai 89,13 % dari target 90 % karena :
 - Faktor pendorong : target kinerja
 - Faktor Penghambat : Persentasenya menurun karena pandemi covid maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH)
4. Opini BPK atas LKPD target WTP hasil yang diperoleh NA, disebabkan:
 - Faktor pendorong : Komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Faktor Penghambat : Pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan Kas Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian personil penatausahaan keuangan. Pengumuman Opini dari BPK biasanya pada bulan Mei tahun berikutnya.
5. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, target 98,7 % Tercapai 78,83 % disebabkan :

Faktor pendorong : Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam proses pemanfaatan.

Faktor Penghambat : Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan.

6. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak target 0,72 % tercapai 0,70 % dikarenakan :

Faktor pendorong : Pelaksanaan kegiatan pendataan massal SISMIOP Objek dan Subjek PBB-P2 menyumbang kenaikan objek pajak terbesar.

Faktor Penghambat : Dibutuhkan anggaran yang lumayan besar untuk pendataan massal.

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja maka realisasi anggaran sebesar 78,48 % menunjukkan ada banyak kegiatan telah tercapai yang melakukan efisiensi. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan zoom meeting dll
2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.

2.2.2.Data Pokok

Data pokok BPKPAD dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%

Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	308.466.748.340	252.019.934.778	278.3 06.40 8.650	307.456.823 .576	363.956.011 .433
Realisasi Pendapatan Daerah	1.779.850.394.321	1.731.168.366.27 6	1.840. 953.3 06.30 3	1.830.815.0 32.558	1.950.113.7 39.891
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	17,33	14,56	15,12	16,79	18,66

Sumber: CALK 2017-2019 dan LRA 2020 - Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah . tahun 2021 tercapai sebesar 18,67% dari realisasi pendapatan daerah, persentase . 2021 ini meningkat ketika dibandingkan dengan capaian persentase tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, pada tahun 2020 persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2021 capaian realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 18,67%.

Tabel 2.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	308.466.748. 340	252.019.934.7 78	278.306.408.650	307.431.698.5 76	364.099.510.2 73
I.A Hasil Pajak Daerah	38.291.278.0 94	40.401.374.47 0	53.424.094.046	47.887.604.81 3	52.832.251.11 9
I.B Hasil Retribusi Daerah	16.687.218.8 37	12.702.535.34 4	16.189.001.249	8.436.169.882	9.421.733.763
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.762.738.2 61	24.857.473.73 1	14.571.585.064	18.800.858.16 5	19.633.082.91 7

I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	239.725.513. 148	174.058.551.2 33	190.121.728.291	232.307.065.7 16	282.212.442.4 74
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------

Sumber: CALK 2017-2020 dan LRA 2021 . Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan juga sebesar 22%. Capaian untuk tahun 2021 melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya baik dari sektor hasil pajak daerah, capaian yang sekarang meningkat kecuali dengan tahun 2019. Dan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya. Dari sisi retribusi memang capaian meningkat ketika dibandingkan dengan tahun 2020 akan tetapi ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang lain capaian ini masih tergolong rendah.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu :

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahun 2021 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup indikator :

- i. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

Jumlah Program

- ii. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

- iii. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

- iv. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen)di luar gaji;
3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari penerimaan dana transfer umum; dan
4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.

Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.

d. Penyerapan Anggaran

Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase anggaran belanja terhadap realisasi.

Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 % maka 0

e. Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

f. Opini BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2017 sampai 2019) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Pengolahan data untuk Indeks Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Temanggung = **NA**

Hal ini disebabkan Pengukuran IPKD menjadi tanggung jawab Propinsi, sedangkan kewajiban kabupaten/kota memasukkan data ke dalam aplikasi <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>. Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kewajiban tersebut, tinggal menunggu hasil pengukuran oleh Propinsi.

3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Prosentase Konsistensi Penganggaran Terhadap Perencanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi

berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran yang berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung dengan rumus jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus persen.

Rumusnya adalah jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus.

Adapun persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan & penganggaran	1810	1859	2.754	2.862	2.138

jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan	2200	2175	2.815	2.966	2.143
Persentase konsistensi penganggaran thd perencanaan (%)	81,73	85,47	97,83	96,49	99,77

Sumber Data: Bidang Penganggaran

Di tahun 2021 terjadi kenaikan dibanding tahun 2020 yaitu dari 96.49% menjadi 99,77% hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dimana tidak ada perbedaan dalam setiap kegiatan, karena pembaharuan nomenklatur dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019 telah disusun sejak proses perencanaan. Adapun pada Perubahan APBD TA 2021 ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa teranggarkan sesuai perencanaan hal disebabkan karena efisiensi dan efektifitas mengingat APBD Kabupaten Temanggung mengalami defisit yang salah satu solusinya adalah melakukan efisiensi.

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (BARU)

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) di luar gaji;

3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer umum; dan
4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Tabel 2.7

Indeks dimensi pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks (D.2)
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	1	$\frac{1+1+1+1}{4}=1$	$=4/4*100$ $=100$
Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji	1		
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	1		
Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal	1		

Sumber data : Bidang Penganggaran

Pada . dapat dilaporkan bahwa pengalokasian anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk hal-hal sebagaimana tersebut diatas (tabel 11) telah sesuai dengan ketentuan. Secara rinci persentase pengalokasian anggarannya sebagai berikut :

Alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp585.038.982.552,00 atau sebesar 28,5% ;

1. Alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar Rp491.496.959.816 ,00 atau sebesar 30,38% ;
2. Alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp173.560.645.120,00 atau sebesar 26,03% ;

3. Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp 154.091.486.002,00

c. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan secara jelas tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Penyampaian rancangan Perubahan KUA PPAS oleh Kepala Daerah	Paling lambat minggu I Bulan Agustus
2	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA PPAS	Paling lambat minggu II Bulan Agustus
3	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPASKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Paling lambat minggu II bulan - 89 - Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	September
5	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September
6	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
7	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang

	tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur
8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
9	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	
11	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan dikali seratus persen. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung 5 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu	3	3	4	6	7

total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan	7	7	7	7	7
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	42,86	42,86	57,14	85,71	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran (tahapan penyusunan Perubahan APBD TA 2021)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase dokumen penganggaran tepat waktu pada Tahun 2021 sebesar 100%. Semua dokumen penganggaran yang tahapannya berlangsung pada tahun 2021 dapat disusun dan ditetapkan sesuai jadwal. Dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada tabel

diatas adalah dokumen penganggaran terkait tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Secara lengkap dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud terinci pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Dokumen Penganggaran	TAHUN					%
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	x	x	V	V	V	
2	Kesepakatan KUA & PPAS	x	x	x	V	V	
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA	x	x	x	V	V	
4	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	x	x	x	x	V	
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	V	V	V	V	V	
6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	V	V	V	V	V	
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	V	V	V	V	V	

Sumber Data : Bidang Penganggaran

Keterangan : V = Tepat waktu

X = Tidak tepat waktu

Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok ukurnya beda.

d. Prosentase Penerbitan SP2D Online Yang Tepat Waktu.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) (sumber: Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2021).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%.

Penerbitan SP2D di Kabupaten Temanggung di awal Desember 2021 sudah menggunakan aplikasi SP2D online.

Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu
2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Total SP2D yang dicairkan tepat waktu (%)	5.118	6.754	7.735	8.566	8.757
Total SP2D yang diterbitkan (%)	5.118	6.754	7.735	8.566	8.757
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena

setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Adapun data penerbitan SP2D Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Data Penerimaan SPM & Penerbitan SP2D Tahun 2021

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	565	565
2	Dinas Kesehatan	372	372
3	Puskesmas Rejosari	29	29
4	Puskesmas Dharma Rini	31	31
5	Puskesmas Bulu	27	27
6	Puskesmas Tembarak	27	27
7	Puskesmas Selopampang	28	28
8	Puskesmas Temanggung	22	22
9	Puskesmas Kranggan	31	31
10	Puskesmas Tlogomulyo	26	26
11	Puskesmas Pringsurat	33	33
12	Puskesmas Kaloran	36	36
13	Puskesmas Kandangan	34	34
14	Puskesmas Kedu	34	34
15	Puskesmas Parakan	38	38
16	Puskesmas Bansari	36	36
17	Puskesmas Kledung	45	45
18	Puskesmas Ngadirejo	30	30
19	Puskesmas Jumo	37	37
20	Puskesmas Gemawang	30	30
21	Puskesmas Tretep	34	34
22	Puskesmas Candiroto	36	36
23	Puskesmas Bejen	26	26
24	Puskesmas Tepusen	31	31
25	Puskesmas Traji	27	27
26	Puskesmas Pare	21	21
27	Puskesmas Wonobojo	32	32

28	Puskesmas Banjarsari	24	24
29	Rumah Sakit Umum Daerah	70	70
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	468	468
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	103	103
32	Dinas Sosial	119	119
33	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	106	106
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	87	87
35	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	375	375
36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	293	293
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95	95
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	96	96
39	Dinas Perhubungan	203	203
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	248	248
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	144	144
42	Dinas Penanaman Modal	155	155
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	159	159
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90	90
45	Inspektorat	68	68
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	204	204
47	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	635	635
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87	87
49	Bupati dan Wakil Bupati	3	3
50	Bagian Pemerintahan	2	2
51	Bagian Hukum	18	18
52	Bagian Perekonomian	30	30
53	Bagian Pembangunan	26	26

54	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental	74	74
55	Bagian Umum	245	245
56	Bagian Organisasi	3	3
57	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	64	64
58	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	43	43
59	Sekretariat DPRD	210	210
60	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0
61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150	150
62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81	81
63	Kecamatan Temanggung	92	92
64	Kelurahan Temanggung I	41	41
65	Kelurahan Temanggung II	41	41
66	Kelurahan Butuh	44	44
67	Kelurahan Jampiroso	14	14
68	Kelurahan Jampirejo	36	36
69	Kelurahan Kertosari	36	36
70	Kelurahan Banyuurip	40	40
71	Kelurahan Kowangan	46	46
72	Kelurahan Jurang	49	49
73	Kelurahan Tlogorejo	31	31
74	Kelurahan Kebonsari	48	48
75	Kelurahan Manding	48	48
76	Kelurahan Mungseng	34	34
77	Kelurahan Purworejo	41	41
78	Kelurahan Giyanti	42	42
79	Kelurahan Madureso	28	28
80	Kelurahan Sidorejo	27	27
81	Kelurahan Walitelon Selatan	40	40
82	Kelurahan Walitelon Utara	27	27
83	Kecamatan Tembarak	85	85
84	Kecamatan Pringsurat	74	74
85	Kecamatan Kaloran	78	78
86	Kecamatan Parakan	70	70

87	Kelurahan Parakan Kauman	41	41
88	Kelurahan Parakan Wetan	28	28
89	Kecamatan Bulu	74	74
90	Kecamatan Kedu	73	73
91	Kecamatan Kandangan	58	58
92	Kecamatan Candiroto	47	47
93	Kecamatan Ngadirejo	68	68
94	Kelurahan Manggong	32	32
95	Kecamatan Jumo	58	58
96	Kecamatan Wonobojo	64	64
97	Kecamatan Kranggan	73	73
98	Kelurahan Kranggan	26	26
99	Kecamatan Bejen	67	67
100	Kecamatan Kledung	79	79
101	Kecamatan Bansari	69	69
102	Kecamatan Tlogomulyo	60	60
103	Kecamatan Selopampang	71	71
104	Kecamatan Gemawang	80	80
105	Kecamatan Tretep	81	81
	JUMLAH	8.757	8.757

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2021

Gambar 2.2.1

Cek list Kelengkapan dokumen SPM LS

CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS UNTUK BARANG/JASA/MODAL/BTL NON BELANJA PEGAWAI			
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	FORM SPP-LS		
2.	SALINAN DPA/DPPA YANG DIBERLAKUKAN SEBAGAI SPD		
3.	SSP PPN DAN PPH YANG TELAH DITANDATANGANI		
4.	SPK		
5.	SURAT KETERANGAN NO.REK BANK PIHAK KETIGA/ FOTOCOPY BUKU REKENING		
6.	BA PENYELESAIAN PEKERJAAN		
7.	BA SERAH TERIMA BARANG		
8.	BA PEMBAYARAN		
9.	KUITANSI BERMETERAI CUKUP		
10.	JAMINAN UANG MUKA		
11.	BA PEMERIKSAAN PEKERJAAN		
12.	SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN DENDA KETERLAMBATAN		
13.	INVOICE		
14.	DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN		
15.	SPTJ PENYEDIA		
16.	SPTJ PPTK / PPK		
17.	SPTJ PA		
18.	NPHD		

VERIFIKATOR
.....

Tabel 2.11
REKAPITULASI PENERBITAN SP2D YANG TEPAT WAKTU PER BULAN
PADA TAHUN 2021

NO.	BULAN	SPM	SP2D TEPAT WAKTU
1	JANUARI	342	342
2	PEBRUARI	412	412
3	MARET	661	661
4	APRIL	642	642
5	MEI	694	694
6	JUNI	695	695
7	JULI	713	713
8	AGUSTUS	664	664
9	SEPTEMBER	737	737
10	OKTOBER	790	790
11	NOVEMBER	954	954
12	DESEMBER	1.453	1.453
	Jumlah	8.757	8.757

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 12.3 tidak terdapat perbedaan data antara pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu.

e. **Persentase Realisasi Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Realisasi Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung tahun 2017 sampai 2021 dengan rumus Realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikali 100%.

Adapun Persentase belanja terhadap APBD Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Belanja (Rp)	1.768.574.354.911	1.670.309.285.608	1.841.033.635.270	1.783.202.807.598	1.827.456.909.428
Anggaran Belanja Daerah (Rp)	1.841.286.645.554	1.782.086.882.170	1.946.665.378.928	1.903.418.786.991	2.053.340.949.247
Persentase Belanja terhadap APBD (%)	96,05	93,73	94,57	93,68	88,99

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung selama 5 (Lima) tahun menurun dari 92,47% menjadi 88,99%, Tahun 2019 sampai dengan 2021 Persentase Belanja menurun menjadi 88,99 %. Penurunan Belanja pada tahun tersebut dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari pusat yang menurun. Selain itu pada Tahun 2021 capaian belanja lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya juga dikarenakan dampak dari pandemi covid. Pada Tahun 2021 Pendapatan baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengalami penurunan sehingga mempengaruhi alokasi belanja. Belanja lebih focus untuk menangani covid dan belanja Perangkat Daerah capaiannya menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2021, realisasi belanja mencapai 88,99%.

Rata-rata persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung periode 2017-2021 adalah sebesar 93,21%.

Terhadap capaian belanja yang menurun tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk mendorong Perangkat Daerah agar segera melaksanakan target kinerja agar capaian belanja dan kinerja dapat tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

-162448190605

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
				Rupiah	(%)
4	PENDAPATAN	1.789.293.083.624,00	1.830.789.907.558,00	41.496.823.934,00	2,32
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.969.585.751,00	307.431.698.576,00	55.462.112.825,00	22,01
411	Hasil Pajak Daerah	36.723.000.000,00	47.887.604.813,00	11.164.604.813,00	30,40
41101	Pajak Hotel	150.000.000,00	170.636.594,00	20.636.594,00	13,76
41102	Pajak Restoran	1.294.000.000,00	1.916.160.155,00	622.160.155,00	48,08
41103	Pajak Hiburan	34.000.000,00	39.936.150,00	5.936.150,00	17,46
41104	Pajak Reklame	300.000.000,00	519.430.836,00	219.430.836,00	73,14
41105	Pajak Penerangan Jalan	15.500.000.000,00	15.932.617.325,00	432.617.325,00	2,79
41107	Pajak Parkir	75.000.000,00	114.054.600,00	39.054.600,00	52,07
41108	Pajak Air Tanah	270.000.000,00	272.188.236,00	2.188.236,00	0,81
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.100.000.000,00	12.765.965.103,00	2.665.965.103,00	26,40
41113	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000,00	16.156.615.814,00	7.156.615.814,00	79,52
412	Hasil Retribusi Daerah	7.492.767.100,00	8.436.169.882,00	943.402.782,00	12,59
41201	Retribusi Jasa Umum	5.351.802.250,00	5.719.411.972,00	367.609.722,00	6,87
41202	Retribusi Jasa Usaha	729.928.350,00	1.162.595.760,00	432.667.410,00	59,28
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	1.411.036.500,00	1.554.162.150,00	143.125.650,00	10,14
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.555.026.271,00	18.800.858.165,00	(754.168.106,00)	(3,86)
41301	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.555.026.271,00	18.800.858.165,00	(754.168.106,00)	(3,86)
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.198.792.380,00	232.307.065.716,00	44.108.273.336,00	23,44
41401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	12.000.000,00	38.271.800,00	26.271.800,00	218,93
41402	Jasa Giro	2.904.180.034,00	2.682.531.338,00	(221.648.696,00)	(7,63)
41403	Pendapatan Bunga Deposito	3.270.533.582,00	5.357.372.256,00	2.086.838.674,00	63,81
41404	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.000.000,00	21.000.000,00	16.000.000,00	320,00
41407	Pendapatan Denda Pajak	10.000.000,00	31.043.819,00	21.043.819,00	210,44
41408	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	6.885.000,00	6.885.000,00	100,00
41410	Pendapatan dari Pengembalian	1.589.384.317,00	2.810.979.230,00	1.221.594.913,00	76,86
41415	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	178.249.945.947,00	219.089.857.973,00	40.839.912.026,00	22,91
41417	Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.157.748.500,00	2.269.124.300,00	111.375.800,00	5,16
41418	Pendapatan Denda Pelanggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DANA PERIMBANGAN	1.051.153.212.299,00	1.046.567.778.773,00	(4.585.433.526,00)	(0,44)
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.012.781.000,00	52.880.696.555,00	1.867.915.555,00	3,66
42101	Bagi Hasil Pajak	49.051.299.000,00	51.081.093.306,00	2.029.794.306,00	4,14
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.961.482.000,00	1.799.603.249,00	(161.878.751,00)	(8,25)

5220	BELANJA MODAL	115.814.908.270,00	102.083.054.523,00	(13.731.853.747,00)	(11,86)
52301	Belanja Modal Pengadaan Tanah	99.999.200,00	93.448.300,00	(6.550.900,00)	(6,55)
52302	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
52303	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	4.105.483.500,00	3.896.630.500,00	(208.853.000,00)	(5,09)
52304	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	33.000.000,00	21.600.000,00	(11.400.000,00)	(34,55)
52309	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	237.880.448,00	214.980.699,00	(22.899.749,00)	(9,63)
52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	228.846.200,00	222.633.000,00	(6.213.200,00)	(2,72)
52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.569.645.066,00	1.545.031.148,00	(24.613.918,00)	(1,57)
52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.944.743.913,00	6.747.957.087,00	(196.786.826,00)	(2,83)
52313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	543.450.200,00	529.505.700,00	(13.944.500,00)	(2,57)
52314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	174.234.700,00	166.401.175,00	(7.833.525,00)	(4,50)
52315	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	401.390.330,00	366.149.776,00	(35.240.554,00)	(8,78)
52316	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	340.504.800,00	329.958.999,00	(10.545.801,00)	(3,10)
52317	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	173.662.000,00	162.854.000,00	(10.808.000,00)	(6,22)
52318	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	24.933.200,00	24.933.200,00	0,00	0,00
52319	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	8.323.678.050,00	10.461.780.939,00	2.138.102.889,00	25,69
52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.087.668.000,00	883.695.553,00	(203.972.447,00)	(18,75)
52321	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8.852.798.801,00	7.929.293.489,00	(923.505.312,00)	(10,43)
52322	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
52323	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.221.363.000,00	6.385.289.952,00	(836.073.048,00)	(11,58)
52324	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.012.742.000,00	263.182.100,00	(6.749.559.900,00)	(96,25)
52325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
52326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	27.222.526.919,00	25.866.946.867,00	(1.355.580.052,00)	(4,98)
52327	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	57.340.000,00	57.070.000,00	(270.000,00)	(0,47)
52328	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan	538.315.000,00	336.893.120,00	(201.421.880,00)	(37,42)
52330	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00
52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	426.145.000,00	235.848.550,00	(190.296.450,00)	(44,66)
52332	Belanja Modal BOS	29.385.732.285,00	25.722.157.105,00	(3.663.575.180,00)	(12,47)
52333	Belanja Modal BLUD	10.796.340.658,00	9.606.328.264,00	(1.190.012.394,00)	(11,02)
	Jumlah Belanja	1.903.418.786.991,00	1.783.202.807.598,00	(120.215.979.393,00)	(6,32)
	Surplus (Defisit)	(114.125.703.367,00)	47.587.099.960,00	6.090.276.026,00	0,00

6	PEMBIAYAAN DAERAH	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	123.395.072.830,00	123.395.072.830,00	0,00	0,00
61104	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	123.395.072.830,00	123.395.072.830,00	0,00	0,00
616	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	106.875.000,00	106.875.000,00	100,00
61606	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	106.875.000,00	106.875.000,00	100,00
617	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.247.319.462,00	(119.680.538,00)	(8,75)
61701	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.247.319.462,00	(119.680.538,00)	(8,75)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	10.636.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.636.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
622	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	(828.159.458,00)	(16,56)
62202	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	(828.159.458,00)	(16,56)
625	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.636.369.463,00	5.716.336.105,00	79.966.642,00	1,42
62501	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.636.369.463,00	5.716.336.105,00	79.966.642,00	1,42
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.636.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
	Pembiayaan Netto	114.125.703.367,00	114.861.090.645,00	(735.387.278,00)	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	162.448.190.605,00	0,00	0,00

*Data LRA sd 31 Desember 2021 upload dari aplikasi tanggal 5 JANUARI 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REALISASI APBD BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN	JUMLAH TOTAL	
		ANGGARAN 2021	REALISASI ANGGARAN
I	PENDAPATAN DAERAH	1.883.645.026.164	1.950.257.238.731
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	271.757.079.716	364.099.510.273
a.	Pajak Daerah	45.834.000.000	52.832.251.119
b.	Retribusi Daerah	9.230.953.050	9.421.733.763
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.633.782.917	19.633.082.917
d.	Lain-lain Pendapatan PAD Yang Sah	197.058.343.749	282.212.442.474
2.	Pendapatan Transfer	1.541.799.707.448	1.537.846.595.458
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
a.	Dana Bagi Hasil	50.813.502.000	66.832.564.275
b.	Dana Alokasi Umum	753.140.119.000	753.140.119.000
c.	Dana Alokasi Khusus	312.103.525.781	300.924.916.104
d.	Dana Insentif Daerah (DID)	17.149.213.000	17.149.213.000
e.	Dana Desa	247.881.825.000	247.881.825.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.618.522.667	114.087.366.818
b.	Bantuan Keuangan	39.093.000.000	37.830.591.261
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	70.088.239.000	48.311.133.000
a.	Pendapatan Hibah	571.300.000	571.300.000
b.	Lain-lain Pendapatan	69.516.939.000	47.739.833.000
II	BELANJA DAERAH	2.053.340.949.247	1.827.456.909.428
1.	BELANJA OPERASI	1.373.906.713.450	1.198.550.299.521
a.	Belanja Pegawai	718.221.177.664	681.115.868.693
b.	Belanja Barang dan Jasa	545.478.975.141	424.896.014.331
c.	Belanja Bunga	-	-
d.	Belanja Subsidi	-	-
e.	Belanja Hibah	92.739.551.295	89.549.428.997
f.	Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350	2.988.987.500
2.	BELANJA MODAL	266.067.413.573	219.127.292.008
a.	Pengadaan Tanah	9.000.000.000	58.015.740
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	83.896.202.382	61.235.110.772

c.	Pengadaan Gedung dan Bangunan	92.858.878.990	83.638.790.248
d.	Pengadaan Jalan, Irigasi, Jaringan	74.198.762.300	72.389.167.162
e.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.792.569.901	1.729.295.086
f.	Pengadaan Aset Lainnya	321.000.000	76.913.000
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.704.328.802	5.779.500.000
a.	Belanja Tidak Terduga	8.704.328.802	5.779.500.000
4.	BELANJA TRANSFER	404.662.493.422	403.999.817.899
a.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes/kel	5.675.400.000	5.656.124.477
b.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya	398.987.093.422	398.343.693.422
c.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik		0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(169.695.923.083)	122.800.329.303
III	PEMBIAYAAN	169.695.923.083	168.979.841.981
1.	Penerimaan Pembiayaan	170.943.242.545	170.136.987.651
a.	Penggunaan SILPA	97.987.843.344	97.952.645.136
b.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat		0
c.	Uang Jaminan	8.459.817.029	7.688.778.546
d.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	54.591.032.711	54.591.032.711
e.	Sisa Dana BOS	9.904.549.461	9.904.531.258
2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.247.319.462	1.157.145.670
a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.247.319.462	1.157.145.670
	PEMBIAYAAN NETTO	169.695.923.083	168.979.841.981
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	291.780.171.284

*Data LRA sd 31 Desember 2021 upload dari aplikasi tanggal 5 Januari 2022.

f. Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesesuaian Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan APBD. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut

digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ Administratif Bendahara.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%.

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perangkat Daerah.	47	47	47	47	46
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel.	44	44	45	39	41
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Akuntabel (%)	93	93	95,74	82,98	89,13

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2017-2021 Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tetapi masih ada temuan BPK atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada laporan keuangan di SKPD. Tahun 2021 Laporan Keuangan SKPD sampai dengan Desember 2021 persentasenya meningkat Tahun 2020 karena semakin baiknya pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Hal tersebut karena BPKPAD selalu berupaya melakukan

asistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah sehingga pemahaman pengelola keuangan SKPD yang meningkat.

Tabel 2.14

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Oktober		Nopember		Desember	
		Akuntabel	Tidak Akuntabel	Akuntabel	Tidak Akuntabel	Akuntabel	Tidak Akuntabel
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	V		V			
2	Dinas Kesehatan	V		V			
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V		V			
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V		V			
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		V	V			
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V		V			
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		V			
8	Dinas Sosial	V		V			
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	V		V			
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	V		V			
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		V	V			
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		V	V			
13	Dinas Perhubungan	V		V			
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	V		V			
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	V		V			
16	Dinas Penanaman Modal	V		V			
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V		V			
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	V		V			
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	V		V			
20	Sekretariat Daerah	V		V			
21	Sekretariat DPRD	V		V			
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	V		V			
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	V		V			
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V		V			
25	Inspektorat	V		V			
26	Kecamatan Temanggung	V		V			
27	Kecamatan Tembarak			V			
28	Kecamatan Pringsurat		V		V		
29	Kecamatan Kaloran		V		V		
30	Kecamatan Parakan	V		V			
31	Kecamatan Bulu	V		V			
32	Kecamatan Kedu	V			V		
33	Kecamatan Kandangan	V			V		
34	Kecamatan Candiroto	V		V			

35	Kecamatan Ngadirejo	V		V		
36	Kecamatan Jumo	V		V		
37	Kecamatan Wonobojo	V		V		
38	Kecamatan Kranggan	V		V		
39	Kecamatan Bejen	V		V		
40	Kecamatan Kledung	V		V		
41	Kecamatan Bansari	V		V		
42	Kecamatan Tlogomulyo	V		V		
43	Kecamatan Selopampang	V		V		
44	Kecamatan Gemawang	V		V		
45	Kecamatan Tretep	V		V		
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V		V		
	JUMLAH	41	5	42	4	

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. SPJ Desember belum dikirim

g. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	na

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2017 sampai 2019) memperoleh opini WTP pada tanggal 26 Mei 2021, yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka skor tertinggi dengan bobot 15

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Persentase Tertib Pengelolaan Administrasi Aset Yang Akuntabel di Satuan Kerja

Pengertian Pengelolaan administrasi aset yang akuntabel adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Siregar, 2004)

Satuan kerja yang tertib adalah satuan kerja yang mengirim laporan SPJ Barang sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut sesuai dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan dan penggunaan setiap bulan sesuai pedoman APBD.

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100% .

Adapun Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah satuan kerja yang tertib	130	134	136	137	142
Jumlah satuan kerja	168	168	168	168	168
Persentase (%)	77,38	79,76	80,95	81,55	84,52

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas untuk Tahun 2021 (Oktober-Desember), jumlah satuan kerja yang sudah tertib dalam pengelolaan administrasi aset yang akuntabel sebesar 84,52%. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020.

Adapun daftar pengelolaan administrasi aset yang akuntabel Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel Tahun Anggaran 2021

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Okt	Nop	Des	Okt	Nop	Des
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga						V
2	Koorwilcam Temanggung			V			
3	SMPN 1 Temanggung			V			
4	SMPN 2 Temanggung			V			
5	SMPN 3 Temanggung						V
6	SMPN 4 Temanggung						V

7	SMPN 5 Temanggung					V
8	SMPN 6 Temanggung			V		
9	Koorwilcam Tembarak			V		
10	SMPN 1 Tembarak			V		
11	Koorwilcam Pringsurat					V
12	SMPN 1 Pringsurat			V		
13	SMPN 2 Pringsurat			V		
14	Koorwilcam Kaloran					V
15	SMPN 1 Kaloran			V		
16	SMPN 2 Kaloran					V
17	SMPN 3 Kaloran					V
18	Koorwilcam Parakan			V		
19	SMPN 1 Parakan			V		
20	Koorwilcam Bulu			V		
21	SMPN 1 Bulu			V		
22	SMPN 2 Bulu			V		
23	SMPN 3 Bulu			V		
24	Koorwilcam Kedu					V
25	SMPN 1 Kedu					V
26	SMPN 2 Kedu			V		
27	SMPN 3 Kedu			V		
28	Koorwilcam Kandangan			V		
29	SMPN 1 Kandangan			V		
30	SMPN 2 Kandangan					V
31	SMPN 3 Kandangan			V		
32	Koorwilcam Candioto			V		
33	SMPN 1 Candioto			V		
34	SMPN 2 Candioto			V		
35	Koorwilcam Ngadirejo					V
36	SMPN 1 Ngadirejo					V
37	SMPN 2 Ngadirejo					V
38	Koorwilcam Jumo					V
39	SMPN 1 Jumo					V
40	Koorwilcam Wonoboyo			V		
41	SMPN 1 Wonoboyo			V		
42	SMPN 2 Wonoboyo					V
43	Koorwilcam Kranggan			V		
44	SMPN 1 Kranggan			V		
45	SMPN 2 Kranggan			V		
46	Koorwilcam Bejen			V		
47	SMPN 1 Bejen			V		
48	SMPN 2 Bejen					V
49	Koorwilcam Kledung			V		

50	SMPN 1 Kledung			V			
51	SMPN 2 Kledung						V
52	Koorwilcam Bansari			V			
53	SMPN 1 Bansari			V			
54	Koorwilcam Tlogomulyo			V			
55	SMPN 1 Tlogomulyo			V			
56	SMPN 2 Tlogomulyo			V			
57	Koorwilcam Selopampang			V			
58	SMPN 1 Selopampang			V			
59	SMPN 2 Selopampang			V			
60	Koorwilcam Gemawang			V			
61	SMPN 1 Gemawang			V			
62	Koorwilcam Tretep			V			
63	SMPN 1 Tretep			V			
64	SKB			V			
65	Dinas Kesehatan			V			
66	Rumah Sakit Umum Daerah			V			
67	UPT Labkesda			V			
68	UPT Puskesmas Temanggung			V			
69	UPT Puskesmas Tlogomulyo			V			
70	UPT Puskesmas Tembarak			V			
71	UPT Puskesmas Selopampang			V			
72	UPT Puskesmas Pringsurat			V			
73	UPT Puskesmas Kranggan			V			
74	UPT Puskesmas Pare			V			
75	UPT Puskesmas Parakan			V			
76	UPT Puskesmas Traji			V			
77	UPT Puskesmas Bulu			V			
78	UPT Puskesmas Ngadirejo			V			
79	UPT Puskesmas Kaloran			V			
80	UPT Puskesmas Tepusen			V			
81	UPT Puskesmas Candiroto			V			
82	UPT Puskesmas Bejen			V			
83	UPT Puskesmas Bansari			V			
84	UPT Puskesmas Wonobojo			V			
85	UPT Puskesmas Tretep			V			
86	UPT Puskesmas Kedu			V			
87	UPT Puskesmas Kledung			V			
88	UPT Puskesmas Kandangan			V			
89	UPT Puskesmas Jumo			V			
90	UPT Puskesmas Gemawang			V			
91	UPT Puskesmas Dharma Rini			V			
92	UPT Puskesmas Rejosari			V			

93	UPT Puskesmas Banjarsari			V			
94	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang			V			
95	Dinas Sosial			V			
96	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			V			
97	DPPPAPP dan KB			V			
98	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan			V			
99	DPRKPLH			V			
100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			V			
101	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			V			
102	Dinas Perhubungan			V			
103	Dinas Komunikasi dan Informatika			V			
104	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			V			
105	Dinas Penanaman Modal			V			
106	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			V			
107	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			V			
108	Inspektorat			V			
109	BAPPEDA			V			
110	BPKPAD			V			
111	BKPSDM			V			
112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			V			
113	Pengelola			V			
114	Bagian Umum			V			
115	Prokopim						V
116	Bagian Hukum						V
117	Bagian Kesra						V
118	Bagian Perekonomian			V			
119	Bagian Pembangunan						V
120	Bagian Pemerintahan						V

121	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						V
122	Bagian Organisasi						V
123	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			V			
124	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			V			
125	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			V			
126	Kecamatan Temanggung			V			
127	Kelurahan Temanggung I			V			
128	Kelurahan Temanggung II			V			
129	Kelurahan Butuh			V			
130	Kelurahan Jampireso			V			
131	Kelurahan Jampirejo			V			
132	Kelurahan Kertosari			V			
133	Kelurahan Banyuurip			V			
134	Kelurahan Kowangan			V			
135	Kelurahan Jurang			V			
136	Kelurahan Madureso			V			
137	Kelurahan Sidorejo			V			
138	Kelurahan Tlogorejo			V			
139	Kelurahan Kebonsari			V			
140	Kelurahan Manding			V			
141	Kelurahan Mungseng			V			
142	Kelurahan Purworejo			V			
143	Kelurahan Giyanti			V			
144	Kelurahan Walitelon Selatan			V			
145	Kelurahan Walitelon Utara			V			
146	Kecamatan Tembarak			V			
147	Kecamatan Pringsurat			V			
148	Kecamatan Kaloran			V			
149	Kecamatan Parakan			V			
150	Kelurahan Parakan Wetan			V			
151	Kelurahan Parakan Kauman			V			

152	Kecamatan Bulu			V			
153	Kecamatan Kedu			V			
154	Kecamatan Kandangan			V			
155	Kecamatan Candiroto			V			
156	Kecamatan Ngadirejo			V			
157	Kelurahan Manggong			V			
158	Kecamatan Jumo			V			
159	Kecamatan Wonobojo			V			
160	Kecamatan Kranggan			V			
161	Kelurahan Kranggan			V			
162	Kecamatan Bejen			V			
163	Kecamatan Kledung			V			
164	Kecamatan Bansari			V			
165	Kecamatan Tlogomulyo			V			
166	Kecamatan Selopampang			V			
167	Kecamatan Gemawang			V			
168	Kecamatan Tretep			V			

Sumber Data: Bidang pengelolaan BMD Tahun 2021

b. Persentase Pemanfaatan Aset Di Satuan Kerja

Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pertimbangan “teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana penggunaan.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Adapun Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.18
 Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja
 Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	2.150	2.350	3.391	945	946
Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan	2.462	2.462	3.441	1.200	1.200
Persentase (%)	87,33	95,45	98,55	78,75	78,83

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

Ada beberapa aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan hal ini dikarenakan:

1. Tanah non pertanian yang belum didirikan bangunan.
2. Tanah didirikan bangunan tapi bangunan masih milik Negara (BMN),
belum diserahkan ke PEMDA (contoh:Rusunawa).
3. Bangunan sudah tidak layak untuk dimanfaatkan baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pihak lain.

Dibandingkan Tahun 2020, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan pemanfaatan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jumlah pemanfaatan tahun 2021 sebesar 78,83 %. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dilakukan pendataan atas aset Pemda yang dapat dimanfaatkan diluar data aset Pemda yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Adapun data aset tanah dan gedung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
 Berikut data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2021

Uraian	2020	2021
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang sudah Dimanfaatkan
Tanah	1.073	825
Bangunan	127	121
Jumlah	1.200	946

Sumber : Data Pemanfaatan BMD Tahun 2021

c. Persentasi Tanah Pemda Yang Bersertifikat

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah.

Tujuan pensertifikatan Tanah adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah.
- b. Memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Atas Tanah.
- c. Melaksanakan tertib administrasi Barang Milik Daerah berupa tanah.
- d. Mengamankan Barang Milik Daerah berupa tanah.

Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat di hitung dengan rumus jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dibagi jumlah Tanah Pemda dikali 100%.

Adapun Persentase Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.19
Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	1336	1342	1355	1366	1455
Jumlah Tanah Pemda	2832	2839	2839	2861	2865
Persentase (%)	47,18	47,27	47,27	47,74	50,78

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

Dibandingkan tahun 2020, pada tahun 2021 belum mengalami peningkatan. Pensertifikatan tahun 2021 sebesar 50,78 %.

Tabel 2.20.
Persertifikatan Tanah Pemda Tahun 2021

Uraian	Oktober	November	Desember	Jumlah
Jumlah Sertifikat tanah yang terbit	65	-		65

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun Perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan pajak, sedangkan Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Rumus pertumbuhan objek pajak adalah $n-1$ dibagi n dikali 100%.

Realisasi persentase peningkatan data jumlah objek pajak Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21.
Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah objek pajak terdata	579.607	600.224	607.052	606.871	611.180
Peningkatan OP	54.364	20.617	6.828	6.393	4.309
Persentase Peningkatan OP	10,35%	3,56%	1,14%	1,053%	0,70 %

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Adapun data objek 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Data Objek pajak 5 Tahun
Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
HOTEL	16	18	18	18	18
RESTORAN	183	177	610	600	145
HIBURAN	28	34	19	13	11
PARKIR	46	71	56	55	59
REKLAME	735	671	618	607	1776
PPJ	136.564	138.816	138.377	138.599	193.612
BPHTB	3.065	2.902	2.661	3.199	3159
AIR TANAH	363	371	417	497	570
PBB	579.607	600.224	607.052	606.871	611.180

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

b. Persentase Terverifikasinya Perubahan Data Yang Tepat Waktu

Definisi : Verifikasi perubahan data yang tepat waktu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan permohonan perubahan data yang selesai sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Permohonan perubahan data ini hanya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rumus: Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen.

Adapun Data Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
 Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu
 Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak
 atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	1.113	1,055	8.305	3.985	20.051
		BPHTB	3.065	2.902	2.661	3.199	3.159
	Jumlah		4.178	3.957	10.966	7.184	23.210
2.	Berkas Terverifikasi	PBB-P2	1.113	1,055	8.305	3.985	20.051
		BPHTB	3.065	2.902	2.661	3.199	3.159
	Jumlah		4.178	3.957	10.966	7.184	23.210
3.	Persentase (%)		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Analisis : Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPKPAD khususnya bagian pelayanan.

Tabel 2.24
 Jumlah permohonan Perubahan Data
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan
 Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	jml
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	95	1.643	3.073	4.169	3.636	3.174	58	294	732	1.563	1.311	303	20.051
		BPHTB	171	251	325	307	176	224	265	252	238	224	321	332	3.159
	Jumlah		266	1.894	3.398	4.476	3.812	3.398	323	546	970	1.787	1.632	635	23.210

Analisis : Untuk data permohonan perubahan data PBB-P2 pada Tahun 2021 dimulai bulai Januari karena SPPT PBB-P2 telah didistribusikan ke Kecamatan bulan Januari 2021. Adapun batas pengajuan perubahan SPPT PBB-P2 untuk selesai tahun berjalan dibatasi sampai dengan 30 April 2021, sementara perubahan SPPT PBB-P2 setelah 30 April 2021 sampai dengan 30 September 2021 dipersyaratkan tagihan PBB-P2 tahun berjalan dibayar terlebih dahulu sehingga hasil perubahan SPPT PBB-P2 diikutkan pada cetak massal PBB-P2 tahun berikutnya.

c. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

Terhadap pajak yang bersifat official assessment maka BPPKAD wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah, SKPD yang diterbitkan meliputi;

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang digunakan untuk transaksi pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB. (Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011)

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan stan dan pelayanan publik yang ada. Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai di entri dalam sistem manajemen pendapatan daerah, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsur bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPMPTSP, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketentuan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah, maupun BPHTB.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara

membagi jumlah SKPD yang diterbitkan dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%.

Adapun Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu
Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SKPD yang diterbitkan	2.151	1.788	1.728	1.197	2.346
2	Jumlah permohonan/pengajuan SKPD	2.151	1.788	1.728	1.197	2.346
3.	Persentase(%)	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan(SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel 2.26
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2021

No	Jenis Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1.	Air Tanah	46	48	46	44	48	49	48	44	50	47	53	49	570
2.	Reklame	19	188	134	118	63	250	68	279	221	101	227	107	1.776
	Jumlah	65	236	180	162	111	299	116	323	271	148	280	156	2.346

d. Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga

yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.

Untuk memperoleh angka persentase penerimaan pendapatan daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.

Adapun Persentase realisasi terhadap target pendapatan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27

Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Pendapatan Daerah	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.789.907.558	.950.257.238.731
Target Pendapatan Daerah	1.709.015.655.249	1.782.091.942.671	1.746.113.814.151	1.861.308.494.735	1.798.454.020.290	.883.645.026.164
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	98,23	99,87	99,96	98,91	102,32	103,54

Sumber: CALK 2014-2020 dan LRA 2021 . Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10.163.398.745 jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena penurunan capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah imbas dari pandemi covid-19 walaupun secara persentase capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini tak lepas dari diturunkannya target pendapatan tahun 2020 sebesar 72.015.411.111. sedangkan untuk tahun 2021 ini telah melebihi target pendapatan daerah dimana persentasenya mencapai 103,54%.

Meski dari sisi lain-lain pendapatan yang sah capaian untuk tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan 3 tahun terakhir, akan tetapi hal ini tertutupi oleh capaian dari sektor

pendapatan asli daerah yang meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya karena intensifikasi yang dilakukan oleh OPD pengelola pendapatan berhasil. Dari sektor dana perimbanganpun capaiannya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.28
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	308.466.748.340	251.819.135.353	277.967.595.997	307.431.698.576	364.099.510.273
Dana Perimbangan	1.469.898.249.741	1.069.110.356.426	1.128.052.480.266	1.046.567.778.773	1.537.846.595.458
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.485.396.240	420.138.975.497	434.933.230.040	476.790.430.209	48.311.133.000
Jumlah	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.789.907.558	1.950.257.238.731

Sumber: CALK 2017-2021 dan LRA 2021 . Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

e. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban OPD pemungut pendapatan yang dikirimkan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2020) untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPPKAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester, dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Adapun persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu	19	19	14	14	13
jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan	19	19	14	14	13
Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPKPAD Kab. Temanggung

Pelaporan Pengelola Pendapatan dilaksanakan tepat waktu oleh OPD pengelola pendapatan sesuai pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung.

Tabel 2.30
Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2017 s.d 2021

NO	NAMA OPD	2017		2018		2019		2020		2021	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
3	Dinas Kesehatan	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	-	√	-	√	-	√	-		
5	Dinas Tenaga Kerja	√	-	√	-	√	-	√	-		
6	Dinas Lingkungan Hidup	√	-	√	-	√	-	√	-		
7	Dinas Perhubungan	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	√	-	√	-	√	-	√	-		
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	√	-	√	-	√	-	√	-		
11	Sekretariat Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
12	Kecamatan Temanggung	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-

13	Kecamatan Pringsurat	√	-	√	-	√	-	√	-		
14	Kecamatan Parakan	√	-	√	-	√	-	√	-		
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	√	-	√	-						
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	-	√	-						
17	Dinbudparpora	√	-	√	-						
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	-	√	-						
19	Kecamatan Kaloran	√	-	√	-						
20	RSUD Temanggung										
21	Dinas Perhubungan dan Kominfo										
22	Kelurahan Temanggung II										
23	Kelurahan Butuh										
24	Kelurahan Jampirejo										
25	Kelurahan Banyuurip										
26	Kelurahan Kebonsari										
27	Kelurahan Sidorejo										
28	Kelurahan Parakan Wetan										
29	Dinas Pertanian dan Bunhut										
30	Kelurahan Jampiroso										
31	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja									√	-
32	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan									√	-
33	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan									√	-
34	Dinas Komunikasi dan Informatika									√	-
35	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup									√	-
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									√	-
Jumlah		19	0	19	0	14	0	14	0	13	0

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Tahun 2020 jumlah OPD yang mengelola pendapatan sama dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 14 OPD yaitu BPPKAD, Dindikpora, Dinkes, DPUPKP, Disnaker, DLH, Dishub, Disperindagkop, DPMPTSP, Dinakan, Sekda, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Parakan. perubahan jumlah OPD yang mengelola pendapatan yang terjadi pada tahun 2019 berkaitan dengan adanya perubahan SOTK dimana OPD Dintanpangan, Disdukcapil, Dinbudparpora, Dinarpus dan Kecamatan Kaloran tidak lagi mengelola pendapatan pada tahun 2019 dimana OPD ini awalnya pada tahun 2017 dan 2018 masih melaporkan pendapatan yang dikelolanya sehingga mengurangi jumlah OPD ditahun 2019, dimana pada tahun 2017 dan 2018 berjumlah 19 OPD, tahun 2019 dan 2020 menjadi 14 OPD. Sedangkan tahun 2015 berjumlah 22 OPD dan tahun 2017 mengalami penurunan 2 OPD yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kelurahan Jampiroso yang sudah tidak lagi mengelola pendapatan sehingga jumlah OPD yang mengelola pendapatan pada tahun 2017 berjumlah 20 OPD. Sedangkan tahun 2021 karena SOTK ada beberapa OPD yang digabung seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM berubah nama menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta penambahan OPD baru yang mengelola pendapatan seperti Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga jumlah OPD pengelola pendapatan berjumlah 13.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota
a. Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum Dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPKPAD terdiri dari :

1. administrasi keuangan daerah untuk Penyediaan gaji dan tunjang ASN
2. Adminstrasi umum Perangkat Daerah untuk Penyediaan instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
3. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda untuk Penyediaan Jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 2.31
Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang
Perangkat Daerah Tahun 2021

	Tahun 2020	Tahun 2021
Administrasi keuangan daerah	100 %	100 %
Administrasi UMum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %
Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	100 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari 14 indikator program, dikategorikan SANGAT BAIK (97,82 %) dengan 8 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator akan tercapai yaitu :
 - a. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dari target 100 % tercapai 99,77 % dikarenakan Penggunaan Aplikasi yang sudah menggunakan SIPD.
 - b. Persentase realisasi keuangan tercapai 89 dari target 93 % karena target kinerja
 - c. Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel tercapai 89,13 % dari target 90 % karena target kinerja
 - d. Opini BPK atas LKPD target WTP hasil yang diperoleh NA, disebabkan Komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - e. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, target 98,7 % Tercapai 78,83 % disebabkan Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam proses pemanfaatan.

f. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak target 0,72 % tercapai 0,70 % dikarenakan Faktor pendorong Pelaksanaan kegiatan pendataan massal SISMIOP Objek dan Subjek PBB-P2 menyumbang kenaikan objek pajak terbesar.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah antara lain :

- Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pengurangan pagu anggaran dan kegiatan
- Persentasenya menurun karena pandemi covid maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH)
- Pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan Kas Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian personil penatausahaan keuangan. Pengumuman Opini dari BPK biasanya pada bulan Mei tahun berikutnya.
- Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan.
- Dibutuhkan anggaran yang lumayan besar untuk pendataan wajib pajak massal.
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar Penyediaan pagu anggaran yang lebih akomodatif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BPKPAD.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.32

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja		
				Targ et Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	KEUANGAN					21.094.127.135
	<i>Administrasi Keuangan</i>					15.270.589.459
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab Tmg				15.270.589.459
						5.823.537.676
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					913.119.080
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					153.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab Tmg	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab Tmg	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	12	Bulan	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kab Tmg	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	Bulan	13.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab Tmg	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	Bulan	45.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja		
				Targe t Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	KEUANGAN					21.094.127.135
	<i>Administrasi Keuangan</i>					15.270.589.459
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab Tmg				15.270.589.459
						5.823.537.676
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					913.119.080
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					153.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab Tmg	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab Tmg	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	12	Bulan	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kab Tmg	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	Bulan	13.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab Tmg	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	Bulan	45.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ	Satu	Pagu
				et Kin erja	an	Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab Tmg				559.619.080
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab Tmg	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	12	Bulan	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab Tmg	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	12	Bulan	327.619.080
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	kab Tmg	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12	Bulan	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	40.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	12	Bulan	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya service lift dan genset	12	Bulan	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.627.423.796

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe	Satu	Pagu
				t Kiner ja	an	Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab Tmg				559.619.080
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab Tmg	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	12	Bulan	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab Tmg	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	12	Bulan	327.619.080
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	kab Tmg	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12	Bulan	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	40.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	12	Bulan	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya service lift dan genset	12	Bulan	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.627.423.796

RANCANGAN AWAL RKPd 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ	Satuan	Pagu Indikatif
				et Kin erja		
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					676.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	4	dokumen	77.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	4	dokumen	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	3	dokumen	282.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	3	dokumen	227.000.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	1	paket	30.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe	Satuan	Pagu Indikatif
				t Kiner ja		
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					676.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	4	dokumen	77.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	4	dokumen	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	3	dokumen	282.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	3	dokumen	227.000.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	1	paket	30.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ	Satuan	Pagu Indikatif
				et Kin erja		
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					556.180.400
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	kab Tmg	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	12	kegiatan	495.180.400
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	104	unit kerja	50.000.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	kab Tmg	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	104	unit kerja	11.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	kab Tmg				1.145.000.000
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	kab Tmg	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akutable	104	Unit Kerja	41.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	kab Tmg	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	61.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe	Satuan	Pagu Indikatif
				t Kiner ja		
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					556.180.400
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	kab Tmg	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	12	kegiatan	495.180.400
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	104	unit kerja	50.000.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	kab Tmg	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	104	unit kerja	11.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	kab Temanggung				1.145.000.000
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	kab Tmg	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akutable	104	Unit Kerja	41.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	kab Tmg	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	61.000.000

RANCANGAN AWAL RKPd 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ	Satu	Pagu
				et Kin erja	an	Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	4	Dokume n	143.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	104	Unit Kerja	900.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	kab Tmg				249.516.596
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	kab Tmg	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus			249.516.596
			Pengelolaan Dana darurat mendesak			
			Pengelolaan Dana bagi hasil kab/ kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.291.180.400
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.291.180.400

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe	Satu	Pagu
				t Kiner ja	an	Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	4	Dokume n	143.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	104	Unit Kerja	900.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					249.516.596
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	kab Tmg	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus			249.516.596
			Pengelolaan Dana darurat mendesak			
			Pengelolaan Dana bagi hasil kab/ kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.291.180.400
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.291.180.400

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Targ et Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan Standar Harga	kab Tmg	Tersusunnya standar harga	180	SATUAN KERJA	31.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu , terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan tertibnya pengel;olaan bmd	1	Aplikasi	835.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	1000	bidang	51.453.600
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	578	tanah/Bangunan	165.000.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang da terlaksananya laporan BMD	578	Unit Kerja	208.726.800
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					991.814.400
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					991.814.400
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	12	Bulan	602.907.200
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	kab Tmg	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah & Penetapan / penerbitan SKPD	1000	SKPD	327.180.400

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Targ et Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan Standar Harga	kab Tmg	Tersusunnya standar harga	180	SATUAN KERJA	31.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu , terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan tertibnya pengel;olaan bmd	1	Aplikasi	835.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	1000	bidang	51.453.600
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	578	tanah/Bangunan	165.000.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang da terlaksananya laporan BMD	578	Unit Kerja	208.726.800
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					991.814.400
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					991.814.400
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	12	Bulan	602.907.200
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	kab Tmg	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah & Penetapan / penerbitan SKPD	1000	SKPD	327.180.400

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ	Satuan	Pagu Indikatif
				et Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7
	Penagihan Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	12	Bulan	16.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	12	Bulan	45.726.800

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe	Satuan	Pagu Indikatif
				t Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7
	Penagihan Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	12	Bulan	16.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	12	Bulan	45.726.800

Sumber :BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam ketersediaan anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.33

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
N i h i l					

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 5 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.34

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2029-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	OpenTax	BPKPAD	ABPD	system operasionalisasi Pajak Bumi Daerah versi online	Opentax itu aplikasi pengelolaan dan pengolahan data PBB yang mudah dan dapat dioperasikan secara online..opentax mrpkn aplikasi internal bukan untuk masyarakat dan WP. Misalnya untuk simulasi reklas	Digunakan untuk perencanaan dan potensi, pendatan, pemutakhiran, simulasi usulan skenario ketetapan tahun selanjutnya, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan PBB	BPPKAD 2019

					NJOP Simulasi stimulus ataupun relaksasi		
2	Mapatda	BPKPAD	ABPD	Pelayanan Pajak Daerah untuk BPHTB, Pajak Reklame dan pajak air tanah berbasis Kinerja Integrasi Data	Akses desa Dan kecamatan Untuk pengelolaan dan pemungutan PBB dalam wilayahnya.	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2019
3	SiTante	BPKPAD	ABPD	Sebuah system untuk mencetak tanda terima SPJ yang telah terverifikasi dari OPD	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan keuangan	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2019
4	Klinik Akuntansi	BPKPAD	ABPD	Sebuah inovasi untuk penyelenggaraan Konsultasi Pelaporan Keuangan Daerah dari OPD sehingga pelaporan keuangan menjadi akuntabel.	Media konsultasi penatausahaan keuangan/ SPJ dari OPD ke BPKPAD selaku SKPKD	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2019
5	PBB-Online	BPKPAD	ABPD	Pelayanan PBB-P2 online	Akses wajib pajak yang ingin mengetahui dan menaikan kewajiban membayar pajak	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2021
6	Inovasi 1 : Integrasi data e-BPHTB dengan Zona Nilai Tanah yang ada di kantor Pertanahan (BPN) Kab Temanggung	BPKPAD	ABPD	aplikasi pelayanan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terintegrasi secara host to host dengan Bank Persepsi dan layanan Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata ruang/BPN.	Akses Wajib pajak dengan memasukkan NJOP maka akan keluar informasi tentang pajak yang harus dibayar	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2021
7	Inovasi 2 : Aplikasi SIAP PAKDE	BPKPAD	ABPD	Sistem Informasi Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah)	(Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi terkait pajak daerah kapanpun dan dimanapun secara online, meliputi pendaftaran WP secara online utk	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2021

					mendapatkan NPWPD dan pengisian SPTPD lapor pajak secara online		
8	Inovasi : Penggunaan aplikasi eBMD	BPKPAD	ABPD	Sebuah sistem untuk mencatat persediaan, aset dll dari semua satker	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan BMD	Penatausahaan aset daerah yang akuntabel	BPPKAD 2019
9	Penggunaan e Keuangan	BPKPAD	ABPD	Sebuah sistem untuk mencatat tatakelola perbendaharaan dan sistem akuntansi dari OPD	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan keuangan	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 2 (dua) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.35
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	OPINI WTP yang ke 8	BPK	Nasional	BPKPAD
2	OPINI WTP yang ke 9	BPK	Nasional	BPKPAD
3	OPINI WTP yang ke 10	BPK	Nasional	BPKPAD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dalam rangka: “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2023

VISI BPKPAD KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	15
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	79,5	79,5
			Program pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	100
				Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	89,96
				Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100
				Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100
				Persentase realisasi keuangan	%	93	93

				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90	90
				Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1	88,1
				Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1	99,1
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27	1,27
				Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100
				Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100
				Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95	95
				Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95	95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100

Sumber : Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2023

RKPD BPKPAD TAHUN 2023			RENJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023		
n o	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	n o	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3
	KEUANGAN	36.335.198.055		KEUANGAN	36.335.198.055
	<i>Administrasi Keuangan</i>	15.270.589.459		<i>Administrasi Keuangan</i>	15.270.589.459
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.270.589.459		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.270.589.459
		21.064.608.596			21.064.608.596
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.154.190.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.154.190.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.690.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.690.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.690.000		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.690.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.500.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	85.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	17.627.423.796		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	17.627.423.796
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	676.726.800		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	676.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	77.000.000		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	77.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	282.726.800		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	282.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	227.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	227.000.000

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	556.180.400
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	495.180.400
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50.000.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	11.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.145.000.000
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	41.000.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	61.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	143.000.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	900.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.249.516.596
Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	249.516.596
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.291.180.400
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.291.180.400
Penyusunan Standar Harga	31.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	835.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	165.000.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	260.180.400
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	991.814.400
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	991.814.400
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	602.907.200
Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	327.180.400
Penagihan Pajak Daerah	16.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	45.726.800

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	556.180.400
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	495.180.400
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50.000.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	11.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.145.000.000
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	41.000.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	61.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	143.000.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	900.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.249.516.596
Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	249.516.596
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.291.180.400
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.291.180.400
Penyusunan Standar Harga	31.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	835.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	165.000.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	260.180.400
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	991.814.400
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	991.814.400
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	602.907.200
Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	327.180.400
Penagihan Pajak Daerah	16.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	45.726.800

sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui tidak terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 atau sama dengan nol rupiah.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2023

PD : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5													
5	02						36.335.198.055	457.961.945.936	18.348.594.048	15.903.254.257		2.672.277.004	
5	02	01					16.424.779.459	18.617.849.880	12.059.001.348	11.435.651.547			
5	02	01	2,02				15.270.589.459	15.660.543.555	11.151.424.103	10.607.745.218	95%	10.607.745.218	
5	02	01	2,02	01			15.270.589.459	15.660.543.555	11.151.424.103	10.607.745.218	95%	10.607.745.218	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	01	2,05				25.690.000						
5	02	01	2,05	1			25.690.000						
5	02	01	2,06				186.500.000	134.999.500	106.453.375	98.334.071	93,6%	245.000.000	
5	02	01	2,06	01			10.000.000	9.999.500	9.999.875	9.921.000	99,2%	25.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	01	2,06	04			35.000.000	25.000.000	25.897.700	21.260.354	82,1%	75.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	01	2,06	05			13.500.000	15.000.000	9.763.400	9.762.500	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	01	2,06	08			78.000.000	45.000.000	36.916.900	36.197.730	98,1%	50.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	01	2,06	09			50.000.000	40.000.000	23.875.500	21.192.487	88,8%	80.000.000	Dana Transfer

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		luar daerah										Umum-DAU
5 02 01 2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0		
5 2 1 2,07 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kab Tmg	2	PAKET					0,0%	90.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 2 1 2,07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	3	PAKET					0,0%	85.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 01 2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				622.000.000	641.499.714	601.637.985	562.938.979	88,3%	655.000.000	
5 02 01 2,08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab Tmg	12	Bulan	2.000.000	1.500.000	1.495.000	1.200.000	80,3%	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 01 2,08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab Tmg	12	Bulan	230.000.000	250.000.000	210.000.000	185.066.052	88,1%	250.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 01 2,08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab Tmg	15	orang	390.000.000	389.999.714	390.142.985	376.672.927	96,5%	400.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 01 2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.000.000	2.180.807.111	199.485.885	166.633.279	84,5%	270.000.000	
5 02 01 2,09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab Tmg	12	Bulan	85.000.000	85.000.000	85.835.380	83.521.579	97,3%	100.000.000	Dana Transfer Umum-DAU

KODE REKENING						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
											Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1						2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	01	2,09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	kab Tmg	12	Bulan	160.000.000	2.035.807.111	24.833.720	23.263.000	93,7%	75.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	01	2,09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC	kab Tmg	12	Bulan	25.000.000	10.000.000	18.793.220	15.785.000	84,0%	45.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	01	2,09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	kab Tmg	12	Bulan	50.000.000	50.000.000	70.023.565	44.063.700	62,9%	50.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	02						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				17.627.423.796	435.297.775.856	2.316.465.350	1.926.381.736					
5	02	02	2,01					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				676.726.800	643.525.000	698.521.300	559.811.500	68,5%	750.000.000			
5	02	02	2,01	01				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	kab Tmg	4	dokumen	77.000.000	69.225.000	76.576.800	61.336.737	80,1%	90.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	02	2,01	02				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	kab Tmg	4	dokumen	60.000.000	55.000.000	58.511.800	52.002.000	88,9%	60.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	02	2,01	07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	kab Tmg	3	Dokumen	282.726.800	269.300.000	257.629.400	226.743.013	88,0%	315.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	02	2,01	08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup	kab Tmg	3	Dokumen	227.000.000	250.000.000	256.737.700	219.729.750	85,6%	235.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022										
5 02 02 2,01 1 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	terlaksananya koordinasi penyusunan apdb dengan pem., pemprop, pemkot maupun dengan SKPD serta pemdes	kab Tmg	1	Paket	30.000.000	-	49.065.600	-	0,0%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 02 02 2,02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					556.180.400	553.475.600	478.055.600	384.185.776	71,7%	680.000.000	
5 02 02 2,02 0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	tersedianya daftar gaji bagi pns se kab Temanggung	kab Tmg	14	Kegiatan	495.180.400	493.002.700	417.583.000	339.482.676	81,3%	500.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,02 0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	terlaksananya koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan non gaji serta penerbitan SKPP	kab Tmg	104	Unit Kerja	50.000.000	49.756.700	49.756.600	38.697.900	77,8%	120.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,02 0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pematangan sp2d dengan instansi terkait	kab Tmg	104	Unit Kerja	11.000.000	10.716.200	10.716.000	6.005.200	56,0%	60.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					1.145.000.000	1.139.889.260	1.139.888.450	982.384.460	78,9%	1.772.000.000	

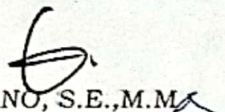
KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 02 02 2,03 0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	kab Tmg	104	Unit Kerja	41.000.000	40.249.500	40.250.000	20.348.500	50,6%	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 02 02 2,03 0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	kab Tmg	1	Dokumen	61.000.000	58.276.000	60.276.150	49.245.600	81,7%	150.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,03 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	kab Tmg	4	Dokumen	143.000.000	107.617.760	142.300.300	138.169.900	97,1%	170.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,03 1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya workshop, Rakor SKPD, Sosialisasi kebijakan Akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kabupaten Temanggung	kab Tmg	104	Unit Kerja	900.000.000	933.746.000	897.062.000	774.620.460	86,4%	1.400.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					15.249.516.596	432.960.885.996	-	-			
5 02 02 2,04 0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	kab Tmg	0 Laporan		249.516.596	415.640.235.996	-	-	0,0%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
												Umum	
5	02	02	2,04	09			15.000.000.000	17.320.650.000	-	-	0,0%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	03					1.291.180.400	3.088.268.500	3.037.709.050	1.845.914.766	1	1.687.277.004	
5	02	03	2,01				1.291.180.400	3.088.268.500	3.037.709.050	1.845.914.766	78,6%	1.687.277.004	
5	02	03	2,01	01			31.000.000	20.669.000	20.669.000	17.924.501	86,7%	25.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	03	2,01	05			835.000.000	833.401.500	833.401.150	819.145.301	98,3%	835.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	03	2,01	07			51.453.600	1.818.380.600	1.828.367.500	711.121.875	38,9%	40.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	03	2,01	10			165.000.000	253.715.000	193.169.000	148.971.418	77,1%	250.000.000	Dana Transfer Umum-DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana		
									Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%				
1					2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5	02	03	2,01	12				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang dan terlaksananya laporan BMD	kab Tmg	103	Unit Kerja	208.726.800	162.102.400	162.102.400	148.751.671	91,8%	537.277.004	Dana Transfer Umum-DAU		
5					02			04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	991.814.400	958.051.700	935.418.300	695.306.208	1	985.000.000		
5					02			04				2,01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	991.814.400	958.051.700	935.418.300	695.306.208	81,7%	985.000.000	
5	02	04	2,01	05				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab Tmg	600	OP	602.907.200	401.363.000	497.051.300	311.241.886	62,6%	600.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		
5	02	04	2,01	06				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	kab Tmg	12	Bulan	327.180.400	496.526.900	367.373.200	318.299.449	86,6%	300.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		
5	02	04	2,01	11				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya penagihan pajak daerah	kab Tmg	12	Bulan	16.000.000	15.022.000	15.023.500	12.337.700	82,1%	20.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		
5	02	04	2,01	13				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD Terlaksananya penagihan pajak daerah	kab Tmg	12	Bulan	45.726.800	45.139.800	55.970.300	53.427.173	95,5%	65.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL							36.335.198.055					

Temanggung, 4 Juli 2022
 KEPALA BPKPAD
 KABUPATEN TEMANGGUNG


 TRI WINARNO, S.E., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19731020 199903 1 005

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri Belanja Daerah Rp 425.701.772.156 dari anggaran Rp.431.726.350.672 atau penyerapan anggaran sebesar 98,60 % sehingga dapat dikatakan kinerja yang efektif dan efisien.

Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp. 78.871.979.682 dari yang ditargetkan sebanyak Rp 85.956.053.300 dengan pencapaian sebanyak 108,98 %.

Faktor pendorong tercapainya target :

- Pendapatan di BBHTP meningkat karena banyaknya pengajuan PTSL dari desa
- Sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPAD dan pemasangan alat rekam transaksi usaha secara elektronik di beberapa tempat usaha.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp **36.335.198.055 (tigapuluh enam milyar tiga ratus tigapuluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah)** terdiri dari:

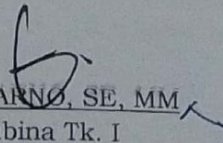
Belanja gaji/tunjangan ASN sebanyak Rp. **15.270.589.459 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah)** dan Belanja Program sebanyak **Rp. 21.064.608.596 (dua puluh satu milyar enam puluh empat juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan enam rupiah)** yang terdiri dari 4 (empat) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Keuangan daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2023
Tabel 5.1

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		8	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11	Pengelolaan Barang Milik Daerah
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022
KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG


TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000

PD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KODE REKBERING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023			Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2023			Pembayaran Saldo Puncung 2024	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan		Pagu Indikator	Moksal	Realisasi			%
1	2	3										
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 02	KEUANGAN					36.315.198.055	457.961.945.946	11.348.594.048	15.993.254.257		2.572.277.000	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.424.779.459	18.617.849.880	12.259.001.348	11.435.601.547			
5 02 01 2,02	Admin/Instansi Keuangan Perangkat Daerah					15.270.589.459	15.660.543.555	11.151.424.103	10.607.745.218	95%	10.607.745.218	
5 02 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tercapainya belanja gaji dan tunjangan pegawai	kab Tmg	14	Bulan	15.270.589.459	15.660.543.555	11.151.424.103	10.607.745.218	95%	10.607.745.218	Dana Transfer Umum DAU
	Disiplin Pegawai					25.690.000						
	Bahan PDH	Terpenuhinya PDH	kab Tmg	70	Potong	25.690.000						
5 02 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					186.500.000		134.999.500	106.453.375	93,6%	245.000.000	
5 02 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik bangunan kantor	kab Tmg	12	Bulan	10.000.000	9.999.500	9.999.875	9.921.000	99,2%	25.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor dan bahan kebersihan	kab Tmg	12	Bulan	35.000.000	25.000.000	25.897.700	21.260.354	82,1%	75.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Tersedianya Barang cetakan dan Fotocopy	kab Tmg	12	Bulan	13.500.000	15.000.000	9.763.400	9.761.500	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan honor pegawai	kab Tmg	12	Bulan	78.000.000	43.000.000	56.916.900	36.197.730	98,1%	50.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat: Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	kab Tmg	12	Bulan	50.000.000	40.000.000	23.875.500	21.192.487	88,8%	80.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
5 2 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (bi modal komputer & printer) honor pengadaan, Pembelian laptop/sekretariat	kab Tmg	2	PAKET					0,0%	90.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 2 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian bi modal meja rapat, rak arloji)	kab Tmg	3	PAKET					0,0%	85.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
5 02 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	kab Tmg	12	Bulan	2.000.000	1.500.000	1.495.000	1.200.000	80,3%	655.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	kab Tmg	12	Bulan	230.000.000	250.000.000	210.000.000	185.066.052	88,1%	250.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan staf pendukung tersedianya tumpukan sampah dan lembar	kab Tmg	15	orang	390.000.000	389.999.714	360.142.985	376.672.927	96,5%	400.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
5 02 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	kab Tmg	12	Bulan	85.000.000	85.000.000	85.835.380	83.521.579	97,3%	100.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	kab Tmg	12	Bulan	160.000.000	2.035.807.111	24.833.710	23.283.000	93,7%	75.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC	kab Tmg	12	Bulan	25.000.000	10.000.000	18.793.210	15.785.300	84,0%	45.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 01 2,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	kab Tmg	12	Bulan	50.000.000	50.000.000	70.023.565	44.063.700	62,9%	50.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 02 2,01	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
5 02 02 2,01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					676.726.800	643.515.000	698.521.300	599.811.900	86,5%	75.000.000	
5 02 02 2,01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	kab Tmg	4	dokumen	77.000.000	63.225.000	76.576.800	61.316.737	80,1%	90.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 02 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS	kab Tmg	4	dokumen	60.000.000	55.000.000	58.511.800	52.002.000	88,9%	60.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 02 2,01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang perubahan APBD Kabupaten Temanggung	kab Tmg	3	Dokumen	282.726.800	269.300.000	257.629.400	226.743.013	88,0%	315.000.000	Dana Transfer Umum DAU
5 02 02 2,01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	kab Tmg	3	Dokumen	227.000.000	250.000.000	255.737.700	219.729.750	85,6%	235.000.000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum

No	Kode	Ind	Sub	Objek	Uraian	Indikator	Satuan	Jumlah	Realisasi	Realisasi %	Realisasi Absolut	Realisasi Relatif	Realisasi Absolut Relatif
5	02	02	2.02	01	Rekonsiliasi dan Pengendalian Keuangan Daerah	terlaksananya daftar gaji bagi PNS dan Pegawai	kab Tmg	14	495.180.400	431.932.700	87,2%	1.270.000.000	250.000.000
5	02	02	2.02	03	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penyetoran Pajak	terlaksananya koordinasi pelaksanaan dan peremajaan kelengkapan dokumen SPJ dan SPK, Perbaikan Pembebasan Rincian Penggunaan Atas Penghasilan SPJ Gaji dan non gaji serta peremajaan	kab Tmg	104	90.000.000	49.736.700	55,3%	120.000.000	50.000.000
5	02	02	2.02	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penyetoran Pajak	terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan penyetoran pajak	kab Tmg	104	11.000.000	10.716.200	97,4%	50.000.000	50.000.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.145.000.000	1.119.889.260	97,8%	1.772.000.000	1.772.000.000	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Keluaran, Pembelian, Bendahara, LLD dan Bahan	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	kab Tmg	104	41.000.000	40.245.500	98,1%	50.000.000	50.000.000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BIUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	kab Tmg	1	61.000.000	58.276.000	95,5%	150.000.000	150.000.000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	kab Tmg	4	143.000.000	107.617.760	75,2%	170.000.000	170.000.000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya workshop, Rakor SKPD, Sosialisasi kebijakan Akuntansi dan tersedianya honor untuk	kab Tmg	104	900.000.000	933.746.000	103,7%	1.400.000.000	1.400.000.000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kawenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			13.249.516.596	412.960.865.996	-	-	-	
5	02	02	2.04	06	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	kab Tmg	0 Laporan	249.516.596	412.640.235.996	-	-	0,0%
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	kab Tmg	0 Laporan	15.000.000.000	17.320.650.000	-	-	0,0%
5	02	02	2.05		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.291.180.400	3.028.298.500	234,6%	1.587.277.004	1.587.277.004	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.291.180.400	3.028.298.500	234,6%	1.587.277.004	1.587.277.004	
5	02	02	2.05	01	Penyusunan Standar Harga	terselenggaranya standar harga	kab Tmg	69	31.000.000	20.639.000	66,6%	25.000.000	25.000.000
5	02	02	2.05	05	Penetapan Standar Harga	terselenggaranya analisis kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan terbitnya peraturan harga bmd	kab Tmg	1	835.000.000	833.401.500	99,8%	835.000.000	835.000.000
5	02	02	2.05	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya tanah Perda yang bersertifikat	kab Tmg	720	51.453.600	1.818.386.600	353,4%	40.000.000	40.000.000
5	02	02	2.05	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Barang Milik Daerah	terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dan sewa tanah eks	kab Tmg	150	165.000.000	253.715.000	153,8%	250.000.000	250.000.000
5	02	02	2.05	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	terlaksananya pembinaan pejabat pengrus barang dan terlaksananya laporan BMD	kab Tmg	103	208.726.800	162.132.400	77,7%	587.277.004	587.277.004
5	02	02	2.06		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			991.814.400	958.051.700	96,6%	965.000.000	965.000.000	
5	02	02	2.06		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			991.814.400	958.051.700	96,6%	965.000.000	965.000.000	
5	02	02	2.06	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	kab Tmg	600	602.807.200	401.963.000	66,7%	600.000.000	600.000.000
5	02	02	2.06	06	Pengajaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah & Penetapan / penerbitan SKPD, Pelayanan Pemutakhiran data wajib pajak dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah	kab Tmg	12	327.180.400	496.526.900	151,8%	300.000.000	300.000.000
5	02	02	2.06	11	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	kab Tmg	12	16.000.000	15.000.000	93,8%	20.000.000	20.000.000
5	02	02	2.06	13	Pengendalian, Pemertaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	kab Tmg	12	45.726.800	45.726.800	100,0%	65.000.000	65.000.000
								TOTAL	35.335.186.055				

jumlah

Jabatan	Tanggal	Paraf
Koordinator	21/2/22	[Signature]
Sd. Koordinator	21/2/22	[Signature]
Anggota	21/2/22	[Signature]

Temanggung, Februari 2022